PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG

(Tesis)

Oleh :

MARYANTO EKO HARTANTO

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG

Oleh :
Maryanto Eko Hartanto

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Selain kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah, terdapat pula kewajiban yang mengikutinya. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabakan pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana diatur undang-undang. Kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya diukur dengan efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilihat dengan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari efektivitas dan kemandirian keuangan daerah serta sistem pengendalian internal terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan struktur data panel dari 16 pemerintah daerah se-Provinsi Lampung selama lima tahun (2010-2014). Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa efektivitas dan kemandirian keuangan daerah serta sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan daerah. Namun, efektivitas dan kemandirian keuangan daerah serta sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah..

Kata Kunci : efektivitas keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan opini laporan keuangan pemerintah daerah..

THE EFFECT OF THE EFFECTIVENESS AND THE REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE OPINION OF THE FINANCIAL STATEMENTS LOCAL GOVERNMENT OF LAMPUNG PROVINCE

By :
Maryanto Eko Hartanto

ABSTRACT

Regional autonomy gives every local government the authority to regulate and manage its own household affairs. In addition to the authority gained by the local government, there are also obligations that follow. The local government shall be responsible for the execution of its duties and authorities in the form of local government financial statements as stipulated by law. The financial performance of local governments is measured by the effectiveness and regional financial independence. Good local financial management can be seen with the opinion of local government financial statements. This study aims to prove empirically the influence of the effectiveness and regional financial independence and internal control system to the opinion of local government financial statements.

This study uses panel data structures from 16 local governments throughout Lampung Province for five years (2010-2014). The results of statistical tests show that the effectiveness and regional financial independence of regional finances and internal control system partially does not affect the opinion of the regional financial statements. However, the effectiveness and regional financial independence and internal control systems together affect the opinion of local government financial statements.

Keywords: financial effectiveness, regional financial independence, system internal control and local government financial statements.

PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MARYANTO EKO HARTANTO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER MANAJEMEN

Pada

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Tesis : **PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Maryanto Eko Hartanto*

No. Pokok Mahasiswa : 1421011019

Konsentrasi : MPKD

Program Studi : Magister Manajemen
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

MENYETUJUI

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc.	**Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.**
NIP 19600426 198703 1 001	NIP 19691128 200012 2 001

Ketua Program Studi Magister Manajemen
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung,

Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.
NIP 19691128 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Komisi Penguji :

   1.1 Ketua Penguji (Pembimbing I) : **Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., Msc.** .....

   1.2 Penguji I : **Dr. Irham Lihan, S.E., M.Si.** .....

   1.3 Penguji II : **Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.** .....

   1.4 Sekretaris Penguji (Pembimbing II) : **Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung,

   Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
   NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana,

   Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
   NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : **1 Agustus 2017**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Pengaruh Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme;
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan bersedia serta sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar lampung, Agustus 2017

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
7CD63AEF135980063
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Maryanto Eko Hartanto

NPM. 1421011019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1980. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sarno dan Ibu Parmini. Penulis telah menikah dengan Putu Yastika Utami.

Pada Tahun 1996, penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Cipedak 01. Pendidikan sekolah menengah di SLTPN 253 Jagakarsa diselesaikan pada Tahun Tahun 1995, lalu lulus dari SMUN 28 Pasar Minggu pada Tahun 1998. Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan di Politeknik Universitas Indonesia sampai dengan Tahun 2001, kemudian untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Pancasila, dan berhasil menyelesaikan perkuliahan pada Tahun 2006.

Pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007, penulis bekerja sebagai *Accounting Staff* pada PT. Arkon Mineratama. Selanjutnya sejak Agustus 2007 sampai dengan sekarang, penulis bekerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kemudian, pada Tahun 2014, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Program Studi Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul **"Pengaruh Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung"** merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila).

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila;
2. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Pascasarjana Unila sekaligus Pembimbing II atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan saran pada proses penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., Msc., selaku Pembimbing I atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan saran pada proses penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Dr. Irham Lihan, S.E., M.Si., selaku Penguji I dalam memberikan masukan dan saran yang membangun pada saat seminar dan ujian;
5. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku Penguji II dalam memberikan masukan dan saran yang membangun pada saat seminar dan ujian;
6. Istriku tercinta Putu Yastika Utami yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi;
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan Tahun 2014 Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila; dan
8. Rekan-rekan kerja di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis,

Maryanto Eko Hartanto

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....

ABSTRAK .....

ABSTRACT.....

HALAMAN PERSETUJUAN.....

HALAMAN PENGESAHAN.....

LEMBAR PERNYATAAN .....

RIWAYAT HIDUP.....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah..... 7

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Manfaat Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1. Keuangan Daerah 10

2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 13

2.3. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 18

2.4. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 21

2.5. Kinerja Keuangan Daerah 23

2.6. Sistem Pengendalian Intern (SPI)..... 26

2.7. Penelitian Terdahulu..... 30

2.8. Kerangka Penelitian 33

2.9. Hipotesis 34

BAB III METODE PENELITIAN..... 39

3.1. Disain Penelitian..... 39

3.2. Jenis Penelitian 39

3.3. Populasi dan Sampel 39

3.4. Jenis dan Sumber Data 40

3.5. Teknik Pengumpulan Data 42

3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 42

3.7. Metode Analisis Data 46

3.7.1. Statistik Deskriptif..... 46

3.7.2. Uji Asumsi Klasik 46

3.7.3. Analisis Regresi Data Panel 49

3.7.4. Uji Statistik F..... 53

3.7.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 53

3.7.6. Uji Statistik t (Uji Parsial) 53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 55

4.1. Deskripsi Data 55

4.2..Uji Asumsi Klasik 57

4.2.1. Multikolinearitas..... 57

4.2.2. Heteroskedastisitas 58

4.2.3. Autokorelasi 58

4.4.4. Normalitas 59

4.3. Analisis Parsial 60

4.4. Analisis Regresi Berganda..... 65

4.4.1. Uji Statistik-F 66

4.4.2. Uji Koefisien Determinasi 67

4.4.3. Uji Statistik t..... 68

4.4.4. Hasil Estimasi Regresi Model *Fixed Effect*..... 69

4.5. Pembahasan 70

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 74

5.1. Simpulan..... 74

5.2. Saran dan Keterbatasan 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Temuan dan Opini LKPD se-Provinsi Lampung TA 2010-2014..... 6

Tabel 3.1 Opini LKPD 45

Tabel 3.2 Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 48

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif..... 55

Tabel 4.2 Uji Statistik-F 67

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Model *Fixed Effect*..... 69

Tabel 4.4 Perbedaan Nilai Intersep Pemerintah Daerah 70

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 34

Gambar 3.1 Kurva Durbin Watson 48

Gambar 4.1 Grafik Uji Heterokesdasitas 58

Gambar 4.2 Kurva Durbin Watson, Uji Autokorelasi..... 59

Gambar 4.3 Histogram Normalitas 60

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Tabulasi Data L-1

Lampiran 2 Statistik Deskriptif L-2

Lampiran 3 Uji *Chow* dengan *Redundant Test* L-3

Lampiran 4 Uji *Hausman* L-4

Lampiran 5 Hasil Regresi Model *Fixed Effect* L-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah berkaitan erat dengan asas desentralisasi. Desentralisasi dan otonomi daerah telah berkembang secara terus menerus. Dengan berakhirnya Orde Baru, saat ini menuntut adanya reformasi pemerintahan dalam segala aspek. Dalam *Glosarry World Bank*, desentralisasi adalah *"A process o f transferring responsibility, authority, and accountability for specific of broad management function to lower levels within an organization, system or program"*. Pada sistem pemerintahan desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Harun (2015) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan salah satu unsur penting bagi *World Bank* dalam menginterpretasikan *Good Governance*. Menurut Agere dalam Mimba (2007), *Good Governance* memiliki beberapa karakteristik, yaitu *responsive*, akuntabilitas, transparansi, memerangi korupsi, kerangka hukum diprediksi dan partisipasi pemerintah.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka di daerah telah dibangkitkan oleh euforia otonomi daerah karena adanya perubahan-perubahan hampir

keseluruh tatanan pemerintahan baik di tingkat pemerintah pusat maupun didaerah itu sendiri. Dengan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Selain kewenangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, terdapat pula kewajiban yang mengikutinya. Dimana pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Sucahyo (2013), penilaian kinerja pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sejalan dengan pendapat Halim (2007) yang menyatakan bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menggunakan rasio keuangan APBD dapat terlihat efektifitas dan efisiensi keuangan daerah. Alat ukur kinerja finansial yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, sedangkan untuk SAP Berbasis Akrual, Laporan Keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah terdiri dari LRA, Neraca, LAK, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain dalam hal ini pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang terdapat pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, diketahui bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, yaitu antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan pendapat Obeidat (2007), agar informasi itu dapat berguna dan bermanfaat bagi *stakeholders*, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif (relevan, andal, dan dapat dipahami). Untuk memenuhi karakteristik kualitatif tersebut maka informasi yang ada pada laporan keuangan harus disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penilaian kewajaran LKPD dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana pemeriksaan tersebut merupakan salah satu tugas pokok BPK yang diamanatkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. LKPD merupakan pertanggung jawaban kepala daerah, dalam hal ini gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. LKPD yang andal tercermin dari opini audit. Semakin andal laporan keuangan maka semakin baik opininya. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, terdapat empat jenis opini atas kewajaran laporan keuangan yang dapat diberikan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ *Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ *Qualified Opinion*), Tidak Wajar (TW/ *Adverse Opinion*) dan Tidak Memberikan Opini (TMP/ *Disclaimer*). Dasar penetapan opini atas LKPD dilakukan dengan mempertimbangkan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Standar

Pelaporan Pemeriksaan Keuangan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD terdiri dari 3 bagian:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
2. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
3. LHP atas Sistem Pengendalian Internal.

LKPD yang andal sangat ditentukan oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki kriteria dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat (PP Nomor 58 Tahun 2005). Sistem pengendalian intern kemungkinan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dari TA 2010 s.d. 2014 terkait hasil pemeriksaan LKPD se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Temuan dan Opini
LKPD se-Provinsi Lampung TA 2010-2014

Tahun	Temuan SPI		Temuan Kepatuhan		Opini LKPD			
	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	WTP	WDP	TW	TMP
2010	111	153.029.459.493,00	101	31.382.340.988,40	5	7	-	3
2011	124	11.150.597.469,50	113	24.874.522.495,89	7	6	-	2
2012	104	9.331.954.288,50	100	55.765.975.974,54	7	6	1	1
2013	93	10.157.643.580,00	115	29.777.934.022,05	6	8	1	-
2014	134	25.517.781.690,12	110	67.637.343.872,23	8	7	-	1
Total	**566**	**209.187.436.521,12**	**539**	**209.438.117.353,11**	**33**	**34**	**2**	**7**
Rata-rata/thn	**113**	**41.837.487.304,22**	**108**	**41.887.623.470,62**	**6,6**	**6,8**	**0,4**	**1,2**

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa rata-rata per tahun untuk temuan SPI adalah sebanyak 113 kasus dengan nilai Rp41.837.487.304,22 dan temuan kepatuhan sebanyak 108 kasus dengan nilai Rp41.887.623.470,62. Selain itu, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus temuan dan nilai temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan regulasi, namun hal ini juga diikuti dengan peningkatan opini laporan keuangan dari TA 2010 sampai dengan TA 2014.

Penelitian yang terkait dengan keandalan laporan keuangan antara lain Rosalin (2011) yang menguji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini dan *timeliness* pelaporan keuangan. Variabel-variabel yang diuji antara lain adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan, sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap opini pelaporan keuangan. Dalam penelitian Iswanto (2013) disebutkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah

berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan, efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap laporan keuangan serta sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap laporan keuangan. Selain itu dalam penelitian Taufik (2014) disebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah beropini WTP dan WDP dengan rasio kemandirian keuangan daerah lebih baik dan tidak berbeda dengan secara signifikan dengan pemerintah daerah beropini TW-TMP.

Terkait fenomena tersebut, penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh efektivitas dan kemandirian keuangan daerah serta sistem pengendalian internal terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian Iswanto (2013) dengan mengambil variabel efektivitas keuangan daerah serta variabel temuan sistem pengendalian internal, selain itu penulis menambahkan variabel kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel dependennya adalah opini LKPD.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pemerintah daerah se-Provinsi Lampung yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 2 pemerintah kota dan 13 pemerintah kabupaten dari TA 2010 sampai dengan 2014.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas keuangan daerah berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah temuan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah efektivitas keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah serta temuan sistem pengendalian intern secara bersama-sama mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris bahwa:

1. Efektivitas keuangan daerah berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Temuan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Efektivitas keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah serta temuan sistem pengendalian intern secara bersama-sama perpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Implikasi Teoritis

   Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, dimana penelitian terkait sektor publik yang ada di Indonesia masih terbatas.

2. Implikasi Praktis

   a. Pihak Pemerintah

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan positif dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

   b. Pihak Masyarakat

      Melalui penelitian ini, masyarakat sebagai *stakeholder* memperoleh informasi sebagai bahan dalam mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab pada pemerintah daerah secara proposional. Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik yang berupa uang ataupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk menggambarkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawaban yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan.

Tujuan pembentukan daerah otonom berdasarkan pasal 18 UUD 1945 Amandemen IV adalah untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Selanjutnya daerah otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Demi terselenggaranya daerah otonomi yang baik, masing-masing daerah perlu menyusun APBD. APBD ini berfungsi untuk:

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah pada umumnya dan kepala daerah pada khususnya, karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (Pasal 1 butir 5 PP Nomor 58 Tahun 2005). Keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi darah serta melakukan peminjaaman.
2. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dana tau kepentingan umum.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan negara memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung antara lain adal APBD dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan manajemen keuangan daerah. Sehingga manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, dan kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha

atau administrasi keuangan daerah. Keuangan daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah antara lain dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain.

2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Manajemen

   Membantu *stakeholder* untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan

dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

   Membantu *stakeholder* dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datan diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

   Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan berbeda dengan pelaporan keuangan. Dengan kata lain, pelaporan keuangan lebih luas daripada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Keuangan.
2. Pengungkapan
3. Informasi Pelengkap.

4. Alat-alat pelaporan keuangan lain.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas dan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi para stakeholder dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang digunakan dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
4. Menyediakan informasi mengendai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya.
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Mardiasmo (2011) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan

   Laporan keuangan digunakan untuk memberi jaminan *stakeholder* bahwa pengelolaan sumber daya telak dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retroprespektif

   Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Laporan keuangan sebagai alat mengawasi pelaksanaan kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamti tren antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Laporan keuangan memungkinkan pihak eksternal untuk memperoleh informasi atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi

   Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang, serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi

   Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna untuk menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat terus menyediakan barang, jasa dan layanan di masa mendatang.

5. Hubungan masyarakat

Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presetasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran

   Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, pembiayaan dan arus kas. Komponen laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Selain laporan keuangan pokok tersebut, pemerintah daerah wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan *(statutory reports)*

2.3. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional, berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Jones dan Pendlebury (2000) bahwa institusi yang mengelola dan menjalankan audit sektor publik berbeda dengan sektor swasta, hal ini disebabkan oleh pengaruh dari undang-undang tertentu. Perbedaan disebabkan latar belakang institusi dan hukum sehingga menjadikan audit sektor publik memiliki prosedur, tanggung jawab dan peran yang lebih luas dibandingkan sektor swasta.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK. BPK diberi kewenangan untuk melaksanakan 3 jenis pemeriksaan yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang dilakukan demi kepentingan manajemen oleh apparat pengawasan intern pemerintah. Menurut pasal 23E UUD RI Tahun 1945, mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini

adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhati lembaga perwakilan. Adapun pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Menurut Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai *(reasonable assurance)* apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas SPI

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang

akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dan pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagal pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.

Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Untuk melakukan pemeriksaan keuangan, BPK telah menetapkan SPKN dan Panduan

Manajemen Pemeriksaan (PMP). SPKN dan PMP tersebut dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan agara ada keseragaman pelaksanaan pemeriksaan keuangan diantara para Pemeriksa BPK.

2.4. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perumusan opini laporan keuangan pemerintah daerah mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini atas laporan keuangan terbagi menjadi:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

   Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. WTP merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan, dimana kondisi tersebut bila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

   a. Bukti pemeriksaan yang cukup mememadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi;
   b. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan;

c. Seluruh laporan keuangan telah disajikan lengkap;

d. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telap tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keungan tersebut.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);

   Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan opini WDP adanya salah saji sebagai berikut:

   a. Karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)

   b. Karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

3. Tidak Wajar (TW);

   Kondisi yang menyebabkan opini TW adalah bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsi terhdadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

   Opini TMP disebabkan adanya pembatasan lingkup yang luar bias sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasara menyatakan pendapat (opini). Dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa menyimpulakan bahwa, terlepas dari perolehan bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.

2.5. Kinerja Keuangan Daerah

Bolton (2003) menyatakan bahwa untuk menyaring esensi pengukuran kinerja yang efektif untuk organisasi sektor publik, diperlukan suatu ukuran yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat mengukur faktor kunci kesuksesan;
2. Memberikan pandangan dari perspektif yang berbeda;
3. Mencerminkan kepedulian para pemangku kepentingan;
4. Digunakan dan dipertimbangkan bersama-sama;
5. Seimbang antara kuantitatif dan kualitatif;
6. Pengukuran yang signifikan;
7. Pengumpulan data pengukuran tidak mengganggu tugas utama.

Menurut Lebas dalam Radnor (2004) menyatakan bahwa pengukuran kinerja mencakup faktor kunci kesuksesan, pengukuran deteksi penyimpangan, langkah-langkah pencapaian prestasi masa lalu, penggambaran status potensial, pengukuran output, pengukuran input dan lain-lain. Kinerja

keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangan-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menurut Akbar (2012), pengukuran kinerja dianggap sebagai alat vital bagi pemberintah untuk tidak hanya mengukur kegiatannya tetapi juga untuk memberikan umpan balik ke manajemen dalam proses membantu meningkatkan kinerja di masa depan.

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \text{ X } 100\%$$

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2007)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinisi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan ektsternal (pemerintah pusat ataupun provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakan dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retibusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2007)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{(Transfer Pusat + Provinsi) + Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja pembagnunan secara optimal. Semakin tinggi persentase alokasi dana belanja rutin berarti alokasi dana investasi (belanja pembangunan) untuk infrastruktur semakin kecil. Rasio aktivitas dihitung dengan membandingkan total belanja rutin atau belanja pembangunan terhadap total APBD, hal ini menggambarkan prioritas alokasi dana pada belanja rutin ataukah belanja pembangunan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio Pertumbuhan mengukur kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing kelompok sumber pendapatan dan pengeluaran. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

2.6. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut Rahman dalam Iswanto (2013), setiap kegiatan dalam organisasi bekerja dalam dua sistem. pertama adalah sistem operasi yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi; dan kedua adalah sistem pengendalian yang

melapisi bekerjanya sistem operasi. Pengendalian dapat berbentuk prosedur, peraturan dan instruksi yang didesain untuk memastikan bahwa tujuan sistem operasi akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dapat dipengaruhi manajemen dimana pegawai dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional organisasi dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Adapun tujuan pengendalian intern adalah:

1. Terciptanya keandalan laporan keuangan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi
3. Mendorong dipatuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut *The Committee of Sponsoring Organization* (COSO) yang dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001) dalam Gondodiyoto (2008), pengendalian intern adalah *"Internal control is process by entity`s board of director, management and other personal designed to providereasonable assurance regarding achievement of objectives in the following categories: a. Realibility of financial reporting, b. Effectiveness and efficiency of operation, and c. Compliance with applicable laws and regulations". The Committee of Sponsoring Organization* juga memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan pengendalian *(control environment)*

2. Penilaian risiko manajemen *(management risk assessment)*
3. Sistem komunikasi dan informasi *(information and communication system)*
4. Aktivitas pengendalian *(control activities)*
5. Pemantauan *(monitoring).*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adopsi dari COSO *Internal Control Framework* dengan dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP ini bersifat *integrated* dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh instansi pemerintah serta bersifat dinamis dan mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Pada pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah".

Selanjutnya pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (1) dikatakan bahwa "Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perarturan perundang-undangan terkait". Definisi Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan *(fraud).*

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang SPKN, laporan atas pengendalian intern mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas laporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Beberapa contoh kondisi tersebut antara lain:

1. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak;
2. Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem;
3. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva;
4. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan aktiva;

5. Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa, karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian;
6. Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang-orang yang mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh sistem tersebut;
7. Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembutatan rekonsiliasi tidak tepat waktu;
8. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut;
9. Kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelakasanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan;
10. Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui.

2.7. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Alat Uji	Hasil
1.	Rosalin (2011)	Independen: 1. Kualitas SDM, 2. Pemanfaatan teknologi informasi, 3. Pengendalian internal akuntansi,	Regresi Berganda	1. Pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan

No.	Peneliti	Variabel	Alat Uji	Hasil
		4. Komitmen organisasi Dependen: Keandalan pelaporan keuangan		pelaporan keuangan, kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan, kualitan sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness pelaporan keuangan
2.	Ekasari (2012)	Independen: 1. Kualitas SDM 2. Pemanfaatan teknologi informasi 3. Sistem pengendalian intern akuntansi. Dependen: Keandalan pelaporan keuangan	Regresi berganda	Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar
3.	Iswanto (2013)	Independen: 1. Efektivitas keuangan daerah 2. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah 3. Sistem pengendalian intern Dependen: Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah	Regresi Data Panel	1. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan 2. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negative terhadap keandalan laporan keuangan; 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap keandalan laporan keuangan.
4.	Taufik (2014)	Independen: 1. Rasio kemandirian keuangan daerah,	Analisis Metode Kuantitatif	1. Kinerja keuangan beropini WTP-WDP dengan rasio aktivitas

No.	Peneliti	Variabel	Alat Uji	Hasil
		2. Rasio efektifitas keuangan daerah, 3. Rasio efisiensi keuangan daerah 4. Rasio aktivitas keuangan daerah Dependen: Opini LKPD		lebih baik dan tidak berbeda dengan beropini TW-TMP 2. Kinerja keuangan beropini WTP-WDP dengan rasio kemandirian lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan beropini TW-TMP 3. Kinerja keuangan beropini WTP-WDP dengan rasio efektivitas tidak lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan beropini TW-TMP 4. Kinerja keuangan beropini WTP-WDP dengan rasio efisiensi lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan beropini TW-TMP 5. Kinerja keuangan antara induk dengan rasio kemandirian lebih baik dan berbeda secara signifikan dengan anak/pemekaran 6. Kinerja keuangan induk dengna rasio efektivitas tidak lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan anak/pemekaran; 7. Kinerja keuangan induk dan dengan rasio efisiensi lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan anak/pemekaran.
5.	Adzani, Akhmad Hafidzan dan Dwi Martani (2014)	Independen: 1. Peranan Masyarakat Madani, 2. Faktor Politik, 3. Hasil Pemeriksaan BPK	Regresi Berganda	1. Peran dan Masyarakat madani memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap opini audit maupun peningkatan opini audit; 2. Politik dinasti memiliki pengaruh negatif

No.	Peneliti	Variabel	Alat Uji	Hasil
		Dependen: Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (opini)		terhadap opini audit pemerintah daerah; 3. Jumlah kasus temuan, jumlah nominal temuan dan jumlah rekomendasi kemungkinan berpengaruh negatif terhadap hasil opini audit atas LKPD

2.8. Kerangka Penelitian

Alat ukur kinerja pemerintah daerah yang dipakai pada penelitian ini adalah rasio efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, digunakan pula parameter SPI yang direfleksikan temuan SPI dari hasil pemeriksaan LKPD sebagai gambaran kualitas transparansi dan akuntabilitas LKPD. Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka memperoleh opini audit yang merupakan suatu simbol kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan keandalan informasi yang ada pada suatu LKPD.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dibuatkan kerangka penelitian tentang pengaruh efektivitas keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung dari TA 2010 sampai dengan 2014, seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

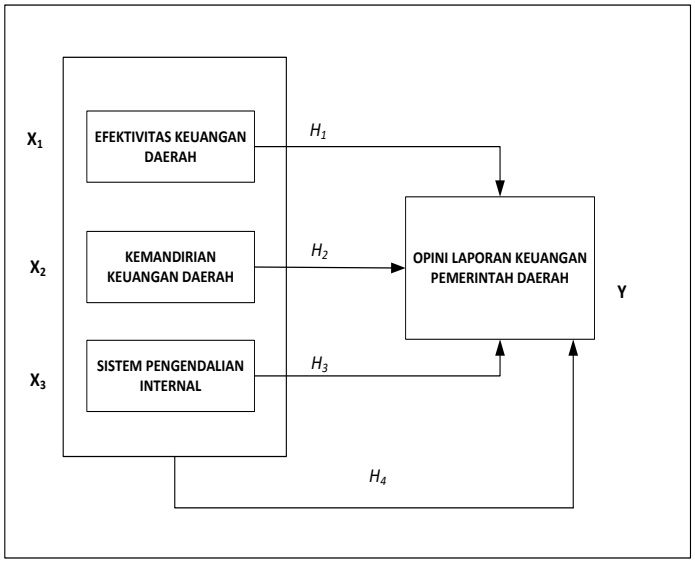

2.9. Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh efektivitas keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan temuan SPI terhadap opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, efektivitas dan kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kemandirian keuangan daerah. SPI diukur dengan sedikit atau banyaknya jumlah kasus temuan SPI yang diungkapkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Analisis terhadap LKPD sangat bermanfaat untuk mengetahui keadaan dan dinamika kinerja keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini membandingkan kinerjanya dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, WDP,

TW dan TMP. Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerahnya semakin baik dan begitu sebaliknya. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan kepada kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas SPI. Hal tersebut dapat direfleksikan dengan sedikit atau banyaknya jumlah temuan yang diungkapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Pengaruh efektivitas keuangan daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah**

   Perkembangan daerah dengan adanya otonomi daerah menunjukkan semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang, apalagi jika daerah tersebut memilliki sumber daya alam yang besar. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut, namun tidak semua daerah menjadi berkembang setelah adanya otonomi. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih cerdas dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Untuk mengukur kinerja

keuangan daerah dapat menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada, salah satunya adalah rasio efektivitas. Oleh karena itu, jika rasio kinerja keuangan suatu pemerintah daerah menunjukkan nilai yang positif maka semakin andal suatu laporan keuangan. Hasil penelitian Iswanto (2013) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Efektivitas keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini LKPD.

2. **Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah**

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal semakin rendah dan begitu pula sebaliknya (Halim, 2007). Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah cenderung untuk berusaha meningkatkan opini laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan

daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2: Kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

3. **Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah**

Keandalan laporan keuangan tergambar dengan perolehan opini dari BPK. Semakin andal laporan keuangan maka semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah. LKPD yang memperoleh opini WTP maupun WDP memiliki sistem pengendalian intern yang lebih memadai dibanding dengan LKPD dengan opini TW ataupun TMP walupun masih perlu perbaikan dan peningkatan. Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan baru dapat tercapai jika pengawasan SPI yang ada memadai. Semakin memadainya pengawasan SPI maka jumlah temuan akan berkurang, sehingga hal ini akan berdampak pula dengan tingkat keandalan laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Iswanto (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap keandalan laporan keuangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Temuan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap opini LKPD.

4. **Pengaruh efektivitas dan kemandirian keuangan daerah serta sistem pengendalian internal secara bersama terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah**

   Pemerintah daerah yang memiliki pengelolaan keuangan daerah yang efektif dalam melaksanakan program pembangunannya dan mandiri dari segi pendanaan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan serta memiliki sistem pengendalian internal yang baik tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerahnya. Akuntantabilitas dan transparansi keuangan tersebut diukur penyajian laporan keuangan daerah yang baik. Dalam hal ini, laporan keuangan pemerintah daerah yang baik tentunya maka semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah.

   H_4: Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah serta temuan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini LKPD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Disain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hipotesis yang bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung. Menurut Sekaran (2000), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau indepedensi dua variabel atau lebih.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh efektivitas keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

   Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda/suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Menurut Augustine (2013), populasi mencakup seluruh unsur dari karakteristik observasi yang

akan diamati. Yang dimaksud dengan populasi di sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan tetapi juga semua obyek penelitian yang dapat diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 13 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota.

2. Sampel Penelitian

   Dalam penelitian sering dihadapkan pada kenyataan bahwa hal yang tidak mungkin untuk meneliti atau mengamati seluruh populasi. Untuk itu, menarik sebagian anggota populasi sebagai sampel menjadi sangat penting dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah *Non Probability Sampling* yaitu *Purposive Sampling*, yang berarti pengambilan data dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Sampel penelitian merupakan LKPD se-Provinsi Lampung TA 2011-2014 yang telah diperiksa oleh BPK.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misal melaui wawancara, penyebaran kuesioner, pengukuran langsung dan lain-lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil atau disadur dari pihak lain, misalnya koran, jurnal, penelitian, publikasi pihak lain dan lain-lain. Tipe data yang biasa digunakan dalam analisis regresi, yaitu:

a) Data Runtut Waktu *(Time Series)*

Data *Time Series* merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu.

b) Data Antar/ Lintas Unit *(Cross Section)*

Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sample

c) Data Panel *(Pooled Data)*

Data ini merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*.

Selain itu, data yang diperoleh dari suatu sampel dan populasi dapat dibedakan antara lain:

a) Data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, dimana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun.
b) Data ordinal adalah data yang selain memiliki atribut juga memiliki peringkat atau urutan.
c) Data interval adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval.
d) Data rasio adalah data yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur

Pada penelitian ini, variabel independen efektivitas keuangan daerah merupakan data rasio, variabel temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan berupa data nominal serta variabel opini laporan keuangan berupa data ordinal.

2. Sumber Data

   Penelitian ini menggunakan data sekunder, adapun data sekunder yang peneliti gunakan diperoleh dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung TA 2011-2014 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan data dari hasil studi pustaka dan teknis dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk memperoleh informasi melalui catatan dan literatur yang relevan, sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri dan mendokumentasikan data atau informasi terkait dengan obyek studi.

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Data LKPD yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung dari TA 2011 sampai dengan TA 2014.

3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sekaran (2006), variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda dalam waktu yang sama untuk objek/orang yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan dependen. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Varibel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lain, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif (Sekaran: 2006). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari efektivitas keuangan daerah, temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada pemerintah daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Efektivitas keuangan daerah yang dipakai pada penelitian ini adalah berupa rasio efektivitas. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Thaun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat pengaruh efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap keandalan LKPD, dimana efektivitas keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \text{ X } 100\%$$

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin tinggi maka pengelolaan keuangan semakin efektif begitu juga sebaliknya.

b. Kemandirian keuangan daerah yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa rasio kemandirian daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinisi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan

tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan ektsternal (pemerintah pusat ataupun provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{(Transfer Pusat + Provinsi) + Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

c. Temuan sistem pengendalian internal

Pengawasan sistem pengendalian internal yang memadai dapat mengurangi atau mengeliminir penyimpangan terhadap standar audit yang telah ditetapkan. Menurut SPKN kelemahan pengendalian intern diperoleh dengan melihat tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan dengan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Berdasarkan definisi tersebut, variabel sistem pengendalian internal yang memadai direfleksikan dengan sedikit atau banyaknya jumlah kasus temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKPD pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Semakin banyak kasus temuan maka semakin kurang baik sistem pengendalian internal, dan sebaliknya semakin kecil

sedikit jumlah kasus temuan maka semakin baik sistem pengendalian internal.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung yang didefinisikan sebagaimana informasi tersebut dapat memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut valid. Informasi yang andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Afrianti, 2011).

Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah disimpulkan melalui opini hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah se-Provinsi Lampung TA 2011-2014. Semakin andal laporan keuangan tersebut maka semakin baik opininya, begitu juga sebaliknya. Dalam penelitian ini, opini hasil pemeriksaan LKPD tersebut digunakan skala 1 sampai dengan 4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memperoleh nilai 4, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memperoleh nilai 3, opini Tidak Wajar (TW) memperoleh nilai 2 dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) memperoleh nilai 1.

Tabel 3.1 Opini LKPD

Opini LKPD	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Opini (TMP)	1

3.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel data dengan bantuan *software* Eviews dan untuk mengetahui tingkat signifikasi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik antara lain:

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum dan minium dari masing-masing data sampel (Ghozali, 2006). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Hasil estimasi regresi yang dilakukan harus bebas dari multikolinearitas, heteroskesdastisitas, autokorelasi dan normalitas, sehingga perlu dilakukan uji asumsi klasik mengetahuinya. Pengujian asumsi klasik antara lain:

a. Multikolinearitas

Uji ini bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Jika variabel independennya saling berkorelasi, maka variabel- variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,90) maka hal

ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas diakibatkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

b. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika *variance* residual dari satu observasi ke observasi lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan menampilkan grafik sebar (*scatter plot*) dari variabel residual kuadrat dan variabel independen. Variabel residual kuadrat dapat dihasilkan dari variabel residual. Variabel residual baru akan dihitung bila kita sudah melakukan estimasi (atau regresi). Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam persamaan model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Autokorelasi

biasa ditemui pada data *time series*, karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi (r = 0)

H_1 : ada autokorelasi (r ≠ 0)

Tabel 3.2 Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	4 – dl < d < 4
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ada keputusan	4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	du < d < 4 - du

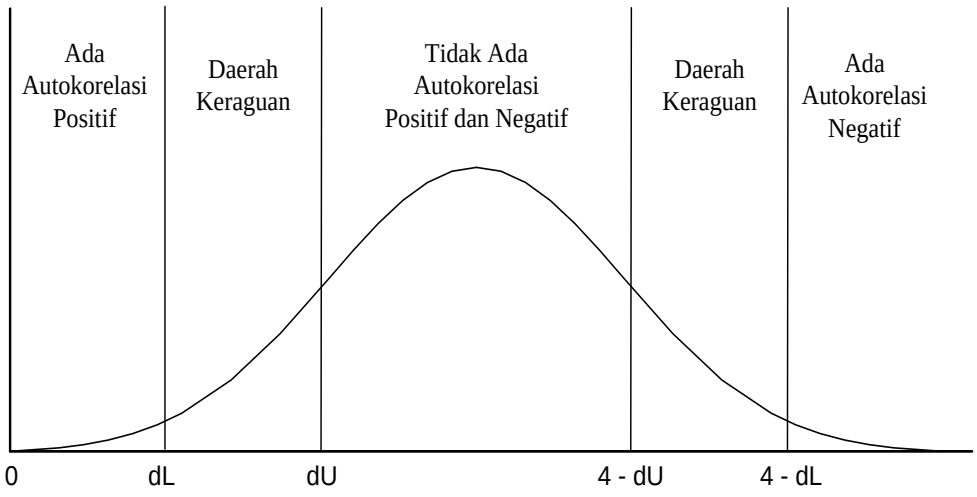

Gambar 3.1. Kurva Durbin Watson

d. Normalitas

Pengujian ini bermaksud untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa pada uji t dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara analisis grafik dan analisis statistik. Dasar pengambilan keputusan pada analisis grafik adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tetapi jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3. Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data berkala *(time series)* dan data individual *(cross section)* (Nacrowi dan Usman, 2006). Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan *data cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Menurut Wibisono (2005), keunggulan regresi data panel yaitu:

a) Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu;

b) Kemampuan mengontrol heterogenitas ini menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih komplek;

c) Data panel mendasarakan diri pada obeservasi cross section yang berulang-ulang (time series) sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai study of dynamic adjustment;

d) Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (multiko) antara data semakin berkurang dan derajat kebebasan (degree of freedom/ df) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien;

e) Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks;

f) Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Permodelan dengan teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya yaitu:

a) Metode *Common Effect* merupakan metode yang hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, diasumsikan bahwa perilaku antara pemerintah daerah sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2006). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar pemerintah daerah sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat tidak sesuai realitas, karena karakteristik pemerintah daerah dari segi kewilayahan berbeda.

b) Metode Fixed Effect merupakan metode yang mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi tetap antar individu dan antar waktu (Widarjono, 2006). Namun intersepnya berbeda antar pemerintah daerah namun sama antar waktu (time invariant). Akan tetapi metode ini memiliki kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter.

c) Metode Random Effect merupakan metode yang akan mengestimasi data panel di mana variabel independen mungkin selain berhubungan antar waktu dan antar individu (Widarjono, 2006) Teknik yang yang digunakan adalah dengan menambahkan variabel gangguan (error terms) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi dengan melakukan Uji *Chow* dan Uji *Hausman* yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* (Widarjono, 2006). Uji *Chow* digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi dengan metode *Common Effect* atau dengan metode *Fixed Effect*, apabila hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Common Effect* yang digunakan, maka uji *Hausman* tidak perlu diuji kembali. Namun apabila hasil Uji *Chow* tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effect*, maka harus ada uji *Hausman* untuk memilih antara metode *Fixed*

Effect atau metode *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Chow-test* atau *Likelihood Ratio Test* dengan asumsi yaitu:

H_o: model mengikuti *Pool*, dan

H_1: model mengikuti Fixed

Pengujian yang dilakukan menggunakan tes *Hausman* dengan asumsi, yaitu:

H_o: model mengikuti *Random Effect*, dan

H_1: model mengikuti *Fixed Effect.*

Penelitian ini menduga bahwa opini LKPD dipengaruhi oleh efektivitas keuangan daerah, temuan sistem pengendalian intern serta kepatuhan. Namun demikian ada faktor lain yang mempengaruhi opini LPKD yang tidak diteliti. Adapun secara umum model regresi data panel (Sriyana: 2014) sebagai berikut:

$$Opini_{it} = \beta_{it} + \beta_{it}Efektivitas_{it} + \beta_{it}Kemandirian_{it} + \beta_{it}SPI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

i	:	1,2, …, N
t	:	1,2, …, T
N	:	Banyak Pemerintah Daerah
T	:	Banyak data Tahun Anggaran
β_{it}	:	Parameter yang ditaksir
ε_{it}	:	Unsur gangguan populasi

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut ini:

a) H_o diterima dan H_a ditolak apabila ρ *value* > 0,05 atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai *alpha* 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak untuk digunakan dalam penelitian.

b) H_o ditolak dan H_a diterima apabila ρ *value* < 0,05 atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai *alpha* 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

3.7.4. Uji Statistik F

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Signifikansi F lebih kecil dari 5% maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi F lebih dari 5% maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%.

3.7.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan variabel independen efektivitas keuangan daerah, kemandiran keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen dalam menjelaskan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar R^2 maka semakin kuat variabel independen semakin menjelaskan variabel dependen.

3.7.6. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistif t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

a) **Ho** diterima dan **Ha** ditolak ρ value > 0,05 atau bila nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen;
b) **Ho** ditolak dan **Ha** diterima ρ value < 0,05 atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas keuangan daerah berupa rasio realisasi PAD terhadap target PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah dengan demikian hipotesis 1 tidak terdukung.
2. Kemandirian keuangan daerah berupa rasio jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah dengan demikian hipotesis 2 tidak terdukung.
3. Sistem pengendalian internal berupa banyaknya jumlah temuan SPI pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah dengan demikian hipotesis 3 tidak terdukung.
4. Efektivitas keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah dengan demikian hipotesis 4 terdukung.

5.2. Saran dan Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masih perlu disempurnakan. Saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menguji efektivitas dan kemandirian keuangan daerah yang merupakan bagiaan dari pengukuran kinerja keuangan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel kinerja keuangan lainnya sebagai variabel bebas, diantaranya efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan keuangan daerah serta menambah jumlah sampel yang ada sehingga akan diperoleh hasil yang lebih memadai.
2. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan BPK RI, pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai *(reasonable assurance)* apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas SPI. Untuk itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel pengukuran kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau menggunakan pengukuran nilai temuan sistem pengendalian internal.

3. Variabel efektivitas dan kemandirian keuangan daerah serta sistem pengendalian internal terhadap opini laporan keuangan daerah secara bersama-sama hanya dapat menjelaskan variabilitas opini laporan keuangan daerah sebesar 71,42%, sedangkan sisanya sebesar 28,58% dijelaskan oleh variabel lainnya yang belum diuji dalam penelitian ini. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat juga menguji pengaruh variabel lainnya, seperti pemanfaatan teknologi, sumber daya manusia, ataupun komitmen organisasi terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adzani, Akhmad Hafidzan dan Dwi Martani. 2014. *Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidakpatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Retrieved from https://staff.blog.ui.ac.id/martani.

Afrianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Universitas Diponegoro. Skripsi.

Augustine, Yvonne dan Robert Kritaung. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi.* Jakarta. PT Dian Rakyat.

Akbar, Hatta Ikromul. 2012. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta).* Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gajah Mada.

Akbar, Rusdi dan Robyn Pilcher, Brian Perrin. 2012. *Performance Measurement in Indonesia: the Case of Local Government.* Pacific Accounting Review. Vol.24 Iss 3.

Anasta, Lawe. 2015. *Studi Eksploratif Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Menggunakan Content Analysis.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.

Asnawi, Said Kelana dan Chandra Wijaya. 2006. *Metodologi Penelitian Keuangan: Prosedur, Ide dan Kontrol*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Bodnar and Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntasi Edisi 9*. Yogyakarta. ANDI.

Bolton, Mike. 2003. *Public Sector Performance Measurement: Delivering Greater Accountability.* Work Study, Vol.52. Issue 1.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2010. Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan.

_____. 2012. Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/7/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemahaman dan Pengujian Sistem Pengendalian Internal.

_____. 2014. Keputusan BPK Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.

_____. 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2010. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

_____. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2011. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

_____. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2012. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

_____. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2013. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

_____. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2014. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Ekasari, Winda. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar).* Retrieved from http://www.infodiknas.com.

Gujarati dan Porter. 1992. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta. Salempa Empat.

Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat

Harun, Harun dan Karen Van-Peursem, Ian R.C Eggleton. 2015. *Indonesia Public Sector Accounting Reforms: Dialogic Aspirations A Step Too Far?.* Accounting, Auditing & Accountanbility Journal Vol.28 Iss. 5.

Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heriningsih, Sucahyo dan Marita. 2013. *Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa).* Buletin Ekonomi Vol.11 No.1 April 2013.

Iswanto. 2013. *Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas lampung.

Jones, Rowan dan Mauric Pendlbury. 2000. *Public Sector Acccounting 5th Edition.* Prentice Hall.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Politik.* Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Martani, Dwi dan Fazri Zaelani. 2011. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mimba, Ni Putu S.H., Jan Van Helden dan Sandra Tillema. 2007. *Public Sector Performance Measurement in Developing Countries.* Journal of Accounting & Organizational Change Vol. 3 Iss. 3.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara.

Obeidat, Mohemmed Ibrahim. 2007. *Accounting Information Qualitative Characteristic Gap: Evidence from Jordan*. International Management Review Vol.3 No.2.

Oesi Agustina. A. 2013. *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (TA 2007-2011).* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Radnor, Zoe dan Mary McGuire. 2004. *Performance Management in The Public Sector: Fact of Fiction?* International Journal of Productivity and Performance Management Vol.53 Iss.3.

Rahman, Aditya. 2011. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Organsasi Perangkat Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Sensus pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya).* Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi

Rosalin, Faristina. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang),* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta. Salemba Empat.

Setyaningrum, Dyah, dan Febriyani Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.9 No.2, hal 154-170.

Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel.* Yogyakarta. Ekonesia

Sucahyo Heriningsih, Marita. 2013. *Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa).* Buletin Ekonomi Vol.11 No.1.

Taufik. 2014. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera).* Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

_____. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

_____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

_____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

_____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta. Ekonisia.